## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amran, E. F., & Sari, Y. N. (2018). Analisis Atas Pelaporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Indovisi*, 1(1), 232802.
- Azhar, S. (2008). Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan. *Bandung: Lingga Jaya*.
- Daerah dan Perubahannya. VisiMedia.
- Febrian Cahyo Pradono, Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2015, Hal. 188-200. ISSN: 1412-3126.
- Indonesia, (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Indonesia, (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Indonesia, (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- Indonesia, K. D. N. R. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Indonesia, K. D. N. R. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jawa Timur, (2016) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- Kabupaten Ngawi, (2017). Peraturan Daerah Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kabupaten Ngawi, (2020). Catatan Atas Laporan Keuangan (Ngawi, Catatan Atas Laporan Keuangan T, 2020)
- Restyanti, A. (2020). Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wati, R. I. (2020). Analisis penerapan pernyataan standar
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan